

*Modul Mata Kuliah*

# TEKNIK MEMBANGUN KONSENSUS

DRA. EVA EVIANY, M.SI.



FAKULTAS HUKUM TATA PEMERINTAHAN  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
JATINANGOR

*Modul Mata Kuliah*

**TEKNIK  
MEMBANGUN KONSENSUS**



**PERHATIAN**

**Modul ini hanya digunakan secara internal  
sebagai materi ajar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri.  
Dilarang menggandakan dan mengedarkan modul  
di luar Institut Pemerintahan Dalam Negeri,  
dan atau mengunggah pada laman internet mana pun  
tanpa seizin tertulis dari penulis.**

*Modul Mata Kuliah*

**TEKNIK  
MEMBANGUN KONSENSUS**

DRA. EVA EVIANY, M.Si.



**FAKULTAS HUKUM TATA PEMERINTAHAN  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
JATINANGOR**

*Modul Mata Kuliah*  
*Teknik Membangun Konsensus*

---

Penulis, Dra. Eva Eviany, M.Si.

Diterbitkan oleh  
Fakultas Hukum Tata Pemerintahan  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Cetakan Pertama, Desember 2019  
viii + 132 (Bibliografi hlm. 127); 24,5 cm

---

file: adn/idd/fthp/ipdn/19

## KATA PENGANTAR

---

Membangun konsensus merupakan upaya yang dilakukan pemerintah atau sekelompok manusia untuk menciptakan kedamaian di dalam kehidupan bersama, mengingat situasi kondisi saat ini, manusia mudah stres dan terjadi persaingan yang ketat dalam memperoleh sumber-sumber yang menunjang proses berlangsungnya kehidupan. Untuk mengatsi dan mencegah terjadinya konflik diperlukannya aparatur yang memiliki kemampuan dalam membangun konsensus. Landasan utama menurut penulis yang mampu membangun konsensus adalah kemampuan dari seorang aparatur dalam mengemas komunikasi persuasif yang bersifat membujuk dan meredam emosi, sehingga mampu mengajak pihak yang berkonflik untuk bermusyawarah mencari solusi dari persoalan yang dihadapi.

Dalam modul ini penulis juga memasuki materi terkait psikologi komunikasi, kenapa? hal ini tentu menimbulkan pertanyaan apa keterkaitan antara membangun konsensus dengan psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi salah satu upaya yang perlu dipahami bagi komunikator atau aparatur dalam meramal komunikasi seperti apa yang perlu dikemas dengan melihat situasi kondisi masyarakat, saat berhadapan dengan masyarakat yang sedang mengalami trauma setelah pasca bencana tentu perlu berbicara lemah lembut mengingat psikologi dari masyarakat tersebut masih labil dan dalam keadaan terguncang. Sedangkan saat seorang komunikator akan berhadapan dengan sekelompok pemuda atau karang taruna dengan tujuan untuk memotivasi tentu perlu mengemas komunikasi dengan mengasah kemampuan retorika yang berapi-rapi dan bersemangat untuk memicu para pemuda tersebut lebih giat bekerja serta mengali ide-ide dan gagasan untuk melahirkan kreativitas.

Tujuan dari penyusunan modul *Teknik Membangun Konsensus* ini untuk memberikan pemahaman bahwa dengan kemampuan yang dimiliki dalam membangun konsensus, akan mendidik manusia untuk hidup secara ideal, serta mempunyai strategi dalam merealisasikan tujuan yang ingin dicapai, baik itu tujuan kelompok, maupun tujuan negara. Teknik membangun konsensus diperlukan untuk mencegah dan mengantisipasi agar konflik tidak terjadi. Pada tataran tingkat selanjutnya strategi konsensus diperlukan untuk merubah konflik menjadi konsensus. Karena dari awal munculnya kata-kata strategi sendiri bermula dari Panglima Perang, yang menyusun siasat khusus dengan tujuan memperoleh

kemenangan dalam peperangan, kalau dihubungi dengan strategi membangun konsensus tentu dengan tujuan mencegah terjadinya konflik dan merubah konflik menjadi konsensus atau kesepakatan.

Strategi membangun konsensus, pada dasarnya merupakan langkah-langkah atau kiat-kiat yang dilakukan oleh aparatur dalam mewujudkan cita-cita ketertiban dan ketentraman masyarakat, yang didalamnya tertuang langkah alternatif apabila dalam pelaksanaan ditemukan hambatan, perlu merumuskan kiat dan langkah berikutnya. Hal yang juga memerlukan perhatian adalah dalam melakukan kesepakatan atau musyawarah, seorang komunikator atau aparatur harus bersifat netral dan terbuka terhadap saran dan masukan dari berbagai pihak, agar ditemukan konsensus yang tepat, yang diterima dan dihargai oleh semua masyarakat atau pihak yang berkonflik.

*Penulis,*

■  
**DAFTAR ISI**

---

■ KATA PENGANTAR.....	v
■ DAFTAR ISI.....	vii
 <b>MODUL 1</b>	
PENGERTIAN DAN MAKNA KONSENSUS .....	1
 <b>MODUL 2</b>	
MEMAHAMI KONFLIK POLITIK .....	9
 <b>MODUL 3</b>	
KIAT MENCEGAH KONFLIK.....	23
 <b>MODUL 4</b>	
KOMUNIKASI PERSUASIF DALAM MENDUKUNG KOMITMEN.....	43
 <b>MODUL 5</b>	
STRATEGI DALAM MEMBANGUN KONSENSUS.....	59
 <b>MODUL 6</b>	
SOSIALISASI NILAI-NILAI PANCASILA .....	67
 <b>MODUL 7</b>	
PENDIDIKAN POLITIK.....	83
 <b>MODUL 8</b>	
ETIKA KOMUNIKASI DALAM MEMBANGUN KONSENSUS.....	91
	<b>vii</b>

**MODUL 9**

PSIKOLOGI KOMUNIKASI DALAM MEMAHAMI MASYARAKAT ..... 101

**MODUL 10**

MEMAHAMI KOMUNIKASI ANTARBUDAYA..... 115

■ DAFTAR PUSTAKA..... 127

# **MODUL TEKNIK MEMBANGUN KONSENSUS**

**Dra. Eva Eviany, M.Si**

**INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

**FAKULTAS POLITIK PEMERINTAHAN**

**TAHUN 2019**

## **KATA PENGANTAR**

Membangun konsensus merupakan upaya yang dilakukan pemerintah atau sekelompok manusia untuk menciptakan kedamaian di dalam kehidupan bersama, mengingat situasi kondisi saat ini, manusia mudah stress dan terjadi persaingan yang ketat dalam memperoleh sumber-sumber yang menunjang proses berlangsungnya kehidupan. Untuk mengatsi dan mencegah terjadinya konflik diperlunkannya aparatur yang memiliki kemampuan dalam membangun konsensus. Landasan utama menurut penulis yang mampu membangun konsensus adalah kemapan dari seorang aparatur dalam mengemas komunikasi persuasif yang bersifat membujuk dan meredam emosi, sehingga mampu mengajak pihak yang berkonflik untuk bermusyawarah mencari solusi dari persoalan yang dihadapi.

Dalam modul ini penulis juga memasuki materi terkait psykologi komunikasi, kenapa?, hal ini tentu menimbulkan pertanyaan apa keterkaitan antara membangun konsensus dengan psykologi komunikasi. Psikologi komunikasi salah satu upaya yang perlu dipahami bagi komunikator atau aparatur dalam meramal komunikasi seperti apa yang perlu dikemas dengan melihat situasi kondisi masyarakat, saat berhadapan dengan masyarakat yang sedang mengalami trauma setelah pasca bencana tentu perlu berbicara lemah lembut mengingat psykologi dari masyarakat tersebut masih labil dan dalam keadaan terguncang. Sedangkan saat seorang komunikator akan berhadapan dengan sekelompok pemuda atau Karang Taruna dengan tujuan untuk memotivasi tentu perlu mengemas komunikasi dengan mengasah kemampuan retorika yang berapi-rapi dan bersemangat untuk memicu para

pemuda tersebut lebih giat bekerja serta mengali ide-ide dan gagasan untuk melahirkan kreatifitas.

Tujuan dari penyusunan modul Teknik Membangun Konsensus ini untuk memberikan pemahaman bahwa dengan kemampuan yang dimiliki dalam membangun konsensus, akan mendidik manusia untuk hidup secara ideal, serta mempunyai strategi dalam merealisasikan tujuan yang ingin dicapai, baik itu tujuan kelompok, maupun tujuan negara. Teknik membangun konsensus diperlukan untuk mencegah dan mengantisipasi agar konflik tidak terjadi. Pada tataran tingkat selanjutnya strategi konsensus diperlukan untuk merubah konflik menjadi konsensus. Karena dari awal munculnya kata-kata strategi sendiri bermula dari Panglima Perang, yang menyusun siasat khusus dengan tujuan memperoleh kemenangan dalam peperangan, kalau dihubungi dengan strategi membangun konsensus tentu dengan tujuan mencegah terjadinya konflik dan merubah konflik menjadi konsensus atau kesepakatan.

Strategi membangun konsensus, pada dasarnya merupakan langkah-langkah atau kiat-kiat yang dilakukan oleh aparatur dalam mewujudkan cita-cita ketertiban dan ketentraman masyarakat, yang didalamnya tertuang langkah alternatif apabila dalam pelaksanaan ditemukan hambatan, perlu merumuskan kiat dan langkah berikutnya. Hal yang juga memerlukan perhatian adalah dalam melakukan kesepakatan atau musyawarah, seorang komunikator atau aparatur harus bersifat netral dan terbuka terhadap saran dan masukan dari berbagai pihak, agar ditemukan konsensus yang tepat, yang diterima dan dihargai oleh semua masyarakat. atau pihak yang berkonflik.

## DAFTAR ISI

MODUL 1.....	5
PENGERTIAN DAN MAKNA KONSENSUS .....	5
MODUL 2.....	17
MEMAHAMI KONFLIK POLITIK .....	17
MODUL 3.....	36
KIAT MENCEGAH KONFLIK .....	36
MODUL 4.....	62
KOMUNIKASI PERSUASIF.....	62
DALAM MENDUKUNG KOMITMEN .....	62
MODUL 5.....	85
STRATEGI DALAM MEMBANGUN KONSENSUS .....	85
MODUL 6.....	98
SOSIALISASI NILAI-NILAI PANCASILA .....	98
MODUL 7.....	119
PENDIDIKAN POLITIK.....	119
MODUL 8.....	131
ETIKA KOMUNIKASI.....	131
DALAM MEMBANGUN KONSENSUS.....	131
MODUL 9.....	145
PSIKOLOGI KOMUNIKASI.....	145
DALAM MEMAHAMI MASYARAKAT .....	145
MODUL 10.....	1661
MEMAHAMI KOMUNIKASI ANTARBUDAYA .....	1661
DAFTAR PUSTAKA .....	182

## MODUL 1

### PENGERTIAN DAN MAKNA KONSENSUS

Makna konsensus tentu tidak terlepas dari keteraturan, kebersamaan dan ketertiban yang ada dalam kehidupan sosial, yaitu dengan memandang perilaku manusia sebagai komunitas yang selalu hidup saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Agar kehidupan tetap terjaga ketentraman dan keteraturan tentu diperlukannya musyawarah dalam memutuskan dan mencari solusi terhadap kehidupan yang sifatnya menyangkut kepentingan bersama. Pendekatan ini atas alasan-alasan yang akan dijelaskan nanti, disebut dengan teori konsensus. Proses kunci yang ditekankan teori ini disebut sosialisasi. Istilah ini merujuk kepada cara manusia mempelajari perilaku tertentu yang diharapkan saling memahami perbedaan yang ada.

Konsensus adalah sebuah frasa untuk menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antar kelompok atau individu setelah adanya perdebatan dan penelitian yang dilakukan dalam kolektif intelijen untuk mendapatkan konsensus pengambilan keputusan. konsensus yang dilakukan dalam gagasan abstrak, tidak mempunyai implikasi terhadap konsensus politik praktis akan tetapi tindak lanjut pelaksanaan agenda akan lebih mudah dilakukan dalam memengaruhi konsensus politik<sup>1</sup>.

Konsensus bisa berawal hanya dari sebuah pendapat atau gagasan yang kemudian diadopsi oleh sebuah kelompok kepada kelompok yang lebih besar karena berdasarkan kepentingan (seringkali dengan melalui sebuah fasilitasi) hingga dapat mencapai pada

---

<sup>1</sup> George Ritzer and Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prenada Media, 2004).

tingkat konvergen keputusan yang akan dikembangkan<sup>2</sup>. Teori konsensus harus menelaah integrasi nilai di tengah-tengah masyarakat. Teori Konsensus berpendapat bahwa aturan kebudayaan suatu masyarakat, atau struktur, menentukan perilaku anggotanya, menyalurkan tindakan-tindakan mereka dengan cara-cara tertentu yang mungkin berbeda dari masyarakat yang lain. Hal ini seperti tata tertib yang diterapkan diberbagai bidang salah satunya setiap sekolah yang mempunyai batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar. Begitupun Individu akan berperilaku yang sama dalam latar sosial karena mereka dibatasi oleh aturan-aturan oleh kebudayaan yang sama.

Meskipun hal ini tidak nampak dalam hal struktur fisiknya, orang yang disosialisasikan dalam aturan ini menemukan hal yang menentukan dan kepastian. Menurut teori sosiologi, sosialisasi menjadi norma dan nilai menghasilkan kesepakatan, atau konsensus. Salah satunya mengenai perilaku dan keyakinan orang-orang yang sesuai, tanpa kedua hal ini masyarakat tidak dapat hidup. Itulah sebabnya cara pandang ini disebut teori konsensus. Melalui sosialisasi, aturan-aturan kebudayaan menstrukturkan perilaku, menjamin konsensus dalam hal perilaku yang di harapkan, dan oleh karena itu menjamin keteraturan sosial.

Emil Durkheim membangun sebuah kesimpulan bahwa eksistensi masyarakat tergantung pada konsensus moral. Ide bahwa konsensus moral adalah kondisi yang diperlukan bagi mewujudkan keteraturan sosial adalah salah satu postulat teori sosial fungsional. Konsensus terkandung dalam konsepnya yang terkenal yaitu kesadaran kolektif yang artinya sumber solidaritas yang mendorong mereka untuk mau bekerja

---

<sup>2</sup> Saifuddin, *Antropologi Kontemporer Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma* (Jakarta, 2006).

sama. Solidaritas mekanik dari kesadaran kolektif ditentukan oleh rumusan Durkheim, bahwa setiap orang “mengetahui bahwa kita sama dengan orang-orang yang merepresentasi kita”<sup>3</sup>. Representasi yang dipikirkan Durkheim adalah bukan hanya menyamakan fisik, melainkan juga kesamaan-kesamaan pikiran dan perasaan<sup>4</sup>.

### ➤ **Konsensus Nasional**

- **Pancasila**

Pancasila merupakan konsensus nasional yang merupakan hasil kesepakatan seluruh Bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan dasar atau landasan dalam menjalankan pemerintahan negara. Pancasila dalam hal ini tidak hanya sebagai suatu pemikiran filsafat dan dasar negara, melainkan berlanjut dalam bentuk gagasan bertindak yang kita sebut ideologi. Ideologi ini tidak saja berkaitan dengan kehidupan kenegaraan, melainkan juga kehidupan masyarakat. Dengan demikian ideologi ini merupakan ideologi negara dan bangsa Indonesia, jadi merupakan ideologi nasional. Sehubungan dengan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa ideologi nasional merupakan keseluruhan ide atau gagasan yang bersumber dan berdasar pada prinsip-prinsip pemikiran (filsafat bangsa: Pancasila) yang termaktup di dalam Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945 sebagai pedoman yuridis konstitusional untuk pelaksanaan guna mencapai cita-cita dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pancasila sebagaimana ideologi manapun di dunia ini, adalah kerangka berfikir yang senantiasa memerlukan penyempurnaan. Karena tidak ada satupun ideologi yang disusun dengan begitu sempurnanya sehingga cukup lengkap dan bersifat abadi untuk semua zaman, kondisi, dan

---

<sup>3</sup> Ritzer and Goodman, *Teori Sosiologi Modern*.

<sup>4</sup> Sri Susanti, *Sosiologi 2* (Jakarta: Quadra, 2008).

situasi. Setiap ideologi memerlukan hadirnya proses dialektika agar ia dapat mengembangkan dirinya dan tetap adaptif dengan perkembangan yang terjadi. Dalam hal ini, setiap warga negara Indonesia yang mencintai negara dan bangsa ini berhak ikut dalam proses merevitalisasi Ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka ini kita wajib bersyukur karena Pancasila adalah ideologi terbuka, sehingga Pancasila di harapkan selalu tetap komunikatif dengan perkembangan masyarakat yang dinamis<sup>5</sup>.

Menurut Alfian (Wiyono, 2012:5) suatu Ideologi terbuka memiliki tiga dimensi, yaitu: (1) dimensi realita, yakni bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut secara riil berakar dan hidup dalam masyarakat; (2) dimensi idealisme yaitu bahwa ideologi tersebut memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik; dan (3) dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yaitu bahwa ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan pengembangan pemikiran.

- UUD 1945

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, segala dinamika kekuasaan, hubungan antar cabang kekuasaan, mekanisme hubungan antara negara, civil society, diikat dan tersimpul dalam suatu dokumen yang disepakati sebagai sumber hukum tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan mendasar. Sejak kemerdekaan, bangsa kita telah menetapkan 8 kali undang-undang dasar, yaitu (1) UUD 1945, (2) Konstitusi RIS 1949, (3) UUDS 1950, (4) UUD 1945 versi Dekrit 5 Juli 1959, (5) Perubahan

---

<sup>5</sup> Suko Wiyono, "EMPAT PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA SEBAGAI PANDUAN DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA," *LIK HITAPRAJNA. Jurnal Ilmiah. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* 15, no. 1 (2012): 37–40.

Pertama UUD 1945 tahun 1999, (6) Perubahan Kedua tahun 2000, (7) Perubahan Ketiga tahun 2001, dan (8) Perubahan Keempat pada tahun 2002, dengan nama yang dipertegas, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di samping UUD 1945 sebagai konstitusi yang tertulis, dalam teori dan praktik, dikenal juga adanya pengertian mengenai konstitusi yang tidak tertulis, misalnya kebiasaan-kebiasaan dan konvensi ketatanegaraan, interpretasi konstitusional oleh pengadilan (dalam hal ini Mahkamah Konstitusi), dan prinsip-prinsip kenegaraan yang hidup dan dipandang ideal dalam masyarakat. Misalnya, ada pengertian yang hidup dalam masyarakat kita bahwa empat pilar kebangsaan Indonesia yang mencakup (1) Pancasila, (2) UUD 1945, (3) NKRI, dan (4) Semboyan Bhinneka-Tunggal-Ika. Karena itu, keempat pilar tersebut juga dapat dipandang berlaku sebagai isi konstitusi Indonesia dalam pengertiannya yang tidak tertulis. Maksudnya, UUD 1945 sendiri tidak menyebut bahwa keempat hal tersebut merupakan pilar kebangsaan, kecuali dalam Pasal 37 ayat (5) yang menyatakan bahwa mengenai bentuk NKRI tidak dapat diadakan perubahan sama sekali.

UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, tidak saja dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi, dan bahkan sosial. Karena itu, UUD 1945 merupakan konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan sekaligus konstitusi sosial. UUD 1945 adalah konstitusi yang harus dijadikan referensi tertinggi dalam dinamika kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan dalam dinamika ekonomi pasar (market economy). Di samping soal-soal politik, UUD 1945 juga mengatur tentang sosial-soal ekonomi dan sosial atau yang terkait dengan keduanya, yaitu :

- (1) Hal keuangan negara, seperti kebijakan keuangan (moneter) dan fiskal.
- (2) Bank sentral.
- (3) Soal Badan Pemeriksa Keuangan Negara hal

kebijakan pengelolaan dan pemeriksaan tanggungjawab keuangan negara.

- (4) Soal perekonomian nasional, seperti mengenai prinsip-prinsip hak ekonomi, konsep kepemilikan pribadi dan kepemilikan kolektif, serta penguasaan negara atas kekayaan sumberdaya alam yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
- (5) Mengenai kesejahteraan sosial, seperti sistem jaminan sosial, pelayanan umum dan pelayanan kesehatan, dan pemeliharaan fakir, miskin, dan anak terlantar oleh negara.

Oleh karena itu, UUD 1945 haruslah dijadikan referensi tertinggi dalam merumuskan setiap kebijakan kenegaraan dan pemerintahan di semua bidang dan sektor. Lagi pula, sekarang kita telah membentuk Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji konstiusionalitas setiap kebijakan yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Oleh sebab itu, para anggota DPR sebagai anggota lembaga yang bertindak sebagai policy maker, pembentuk undang-undang, perlu menghayati tugasnya dengan berpedoman kepada UUD 1945.

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum yang tertinggi memuat gambaran dan hasrat ketatanegaraan republik Indonesia serta gambaran kerangka ketatanegaraan itu serta menentukan tujuan dan garis-garis pokok kebijaksanaan pemerintahan sebagai kontrak sosial antara masyarakat dengan lembaga-lembaga negara maupun antar lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain.

- NKRI

Bentuk Negara Kesatuan adalah bentuk negara yang terdiri dari satu negara saja betapapun besar maupun kecil, dan ke dalam maupun ke luar merupakan kesatuan. Bila suatu negara tidak terjadi karena adanya beberapa negara yang bergabung dan

oleh karenanya kedaulatan negara secara utuh dan bulat ada pada tangan pusat, maka bentuk negara ini disebut negara kesatuan<sup>6</sup>. Sedangkan Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih menyatakan pemahamannya mengenai negara kesatuan: “Disebut negara kesatuan apabila kekuasaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak sama dan tidak sederajat. Kekuasaan Pemerintah Pusat merupakan kekuasaan yang menonjol dalam negara, dan tidak ada saingan dari badan legislatif pusat dalam membentuk undang-undang, kekuasaan pemerintah yang ada di daerah bersifat derivative (tidak langsung) dan sering dalam bentuk otonomi yang luas, dengan demikian tidak dikenal adanya badan legislatif pusat dan daerah yang sederajat, melainkan sebaliknya<sup>7</sup>.”

Pembagian wewenang dalam Negara Kesatuan pada garis besarnya telah ditentukan oleh pembuat undang-undang di pusat, serta wewenang secara terperinci terdapat pada propinsi-propinsi, dan residu powernya terdapat pada pemerintah pusat Negara Kesatuan. Adapun ciri-ciri Negara Kesatuan antara lain adalah: Pertama, Mewujudkan kebulatan tunggal, mewujudkan kesatuan unity, negara tunggal yang monosentris (berpusat satu). Dalam negara kesatuan tidak ada negara dalam negara, dan tidak terdiri dari daerah-daerah yang berstatus negara bagian; Kedua, Hanyamempunyai satu negara serta hanya mempunyai satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatur bagi seluruh daerah negara. Wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Daan Sugandha, *Masalah Otonomi Serta Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, Sinar Baru (Bandung, 1981).

<sup>7</sup> Mohammad Kusnardi and Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1994).

<sup>8</sup> Wiyono, “EMPAT PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA SEBAGAI PANDUAN DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA.”

Menurut CF Strong (2002:80) terdapat esensi negara kesatuan “*The two essential qualities of a unitary state may therefore be said to be (1) the supremacy of the central parliament and (2) the absence of subsidiary sovereign bodies*”<sup>9</sup>. Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa dalam negara kesatuan terdapat supremasi parlemen pusat, dan negara tidak mengakui badan pembentuk undang-undang selain yang ada di pusat. Hanya ada satu pusat kekuasaan yang memutar seluruh mesin pemerintahan dari pusat sampai ke pelosokpelosok, hingga segala sesuatunya dapat diatur secara sentral, seragam dan senyawa dalam keseluruhannya. Daerah tidak mempunyai hak untuk mengurus sendiri daerahnya. Apabila segala sesuatu diatur oleh pemerintah pusat, maka negara kesatuan seperti ini disebut negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi. Pengaturan oleh pusat kepada seluruh daerah tersebut lebih bersifat koordinasi saja namun tidak dalam pengertian bahwa segala-galanya diatur dan diperintahkan oleh pusat. Daerah diberi kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Negara kesatuan yang seperti ini disebut negara kesatuan dengan sistem desentralisasi<sup>10</sup>.

- **Bhinneka Tunggal Ika**

Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno, yang mana kata *bhinneka* merupakan gabungan dua kata: *bhinna* dan *ika*, sedangkan *tunggal ika* merupakan gabungan dua kata *tunggal* dan *ika*. *Bhina* diartikan berbeda-beda dan *ika* diartikan itu sedangkan

---

<sup>9</sup> CF Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Kajian Tentang Sejarah Dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia* (Jakarta: Nusa Media, 2002).

<sup>10</sup> Wiyono, “EMPAT PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA SEBAGAI PANDUAN DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA.”

tunggal diartikan satu. Berdasarkan arti kata tersebut Bhinneka Tunggal Ika berarti “berbeda-beda itu satu itu” yang sering kita artikan berbeda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai semboyan untuk menyatukan seluruh aspek yang terkait dengan kehidupan bangsa Indonesia, yang mana diantara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan dan tentu saja tidak hanya berkait dengan semangat toleransi kehidupan antar umat beragama.

Bhinneka Tunggal Ika sangat tepat bagi bangsa Indonesia yang sangat beragam. Tentang pentingnya pemahaman keberagaman berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia. Prinsip Indonesia sebagai negara “Bhinneka Tunggal Ika” mencerminkan bahwa meskipun bangsa Indonesia dalam realitanya memiliki sifat yang sangat heterogen, baik dari aspek suku bangsa, etnik, kebudayaan, adat istiadat, bahasa serta agama yang dipeluk oleh masyarakat dan hidup dalam negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau, tetapi tetap terintegrasi dalam kesatuan. Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang pada tanggal 28 Oktober 1928 jauh sebelum Indonesia merdeka, pemudanya telah bersumpah menyatakan satu nusa, satu bangsa dan menjunjung satu bahasa persatuan, Indonesia<sup>11</sup>.

### ➤ RANGKUMAN

Konsensus adalah kesepakatan yang diperoleh dengan cara musyawarah, untuk menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antar kelompok atau individu setelah adanya perdebatan dan penelitian yang dilakukan dalam kolektif intelijen untuk mendapatkan konsensus pengambilan keputusan. konsensus yang dilakukan dalam gagasan abstrak, tidak mempunyai implikasi terhadap konsensus politik praktis akan tetapi tindak lanjut pelaksanaan agenda akan lebih mudah dilakukan

---

<sup>11</sup> Wiyono.

dalam memengaruhi konsensus politik. Konsensus bisa berawal hanya dari sebuah pendapat atau gagasan yang kemudian diadopsi oleh sebuah kelompok kepada kelompok yang lebih besar karena berdasarkan kepentingan (seringkali dengan melalui sebuah fasilitasi) hingga dapat mencapai pada tingkat konvergen keputusan yang akan dikembangkan<sup>12</sup>. Teori konsensus harus menelaah integrasi nilai di tengah-tengah masyarakat. Teori Konsensus berpendapat bahwa aturan kebudayaan suatu masyarakat, atau struktur, menentukan perilaku anggotanya, menyalurkan tindakan-tindakan mereka dengan cara-cara tertentu yang mungkin berbeda dari masyarakat yang lain. Hal ini seperti tata tertib yang diterapkan diberbagai bidang salah satunya setiap sekolah yang mempunyai batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar. Begitupun Individu akan berperilaku yang sama dalam latar sosial karena mereka dibatasi oleh aturan-aturan oleh kebudayaan yang sama.

## **TES FORMATIF**

### **➤ PILIHAN GANDA**

1. Pengertian konsensus adalah sebagai berikut, kecuali...
  - a. Kesepakatan
  - b. Keteraturan
  - c. Musyawarah
  - d. Konflik
  
2. Yang merupakan konsensus nasional adalah :
  - a. Pancasila
  - b. Bhineka Tunggal Ika
  - c. Sumpah Pemuda

---

<sup>12</sup> Saifuddin, *Antropologi Kontemporer Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*.

- d. Semua benar
3. Emil Durkheim membangun sebuah kesimpulan bahwa eksistensi masyarakat tergantung
- a. Konsensus moral
  - b. Konflik
  - c. Persaingan
  - d. Arogansi
4. Dalam Pancasila, sila yang berkaitan langsung
- a. Sila pertama
  - b. Sila keempat
  - c. Sila kelima
  - d. Sila ketiga
5. Konsensus akan terlaksana apabila :
- a. Adanya kebersamaan dalam masyarakat
  - b. Saling menghargai perbedaan dan pendapat
  - c. Memelihara Keteraturan dan ketentraman
  - d. Semua benar
6. Bentuk konsensus yang paling sederhana adalah
- a. Musyawarah Tingkat RT
  - b. Rapat Pleno DPRD
  - c. Musyawarah Nasional
  - d. Semua salah

➤ **LATIHAN**

1. Tuliskan dan uraikan pengertian konsensus secara rinci beserta contoh konkrit!
2. Mengapa calon Pamong perlu memahami teknik membangun konsensus?
3. Makna konsensus tentu tidak terlepas dari keteraturan, kebersamaan dan ketertiban yang ada dalam kehidupan sosial, jelaskan maksud dari pernyataan ini!
4. Menurut George, teori konsensus harus menelaah integrasi nilai di tengah-tengah masyarakat, kenapa demikian jelaskan secara rinci!
5. Sumpah Pemuda, merupakan konsensus pertama kali yang bersifat nasional, jelaskan pernyataan ini dengan rinci!